

**AKUNTABILITAS DINAS SOSIAL DAN TENAGA
KERJA DALAM MENGAWASI PENERAPAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

ABSTRAK

ABDUL AZIM (1310831032) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang 2018. Judul Skripsi : Akuntabilitas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dalam Mengawasi Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Kota Padang.

Pembimbing I : Drs. Syaiful, M.Si, dan Pembimbing II : Dewi Anggraini S.IP, M.Si

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *good governance* menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Salah satu prinsip dari *good governance* yaitu akuntabilitas. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Begitupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang merupakan instansi pemerintah yang menangani masalah sosial dan ketenagakerjaan. Permasalahan paling mendasar dalam ketenagakerjaan yaitu pemenuhan upah yang merupakan hak yang harus didapatkan pekerja atau buruh dalam bekerja. Perusahaan tidak boleh membayar pekerja dibawah standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kenyataannya, masih banyak terdapat perusahaan yang masih menggaji pekerjanya dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) termasuk di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas dari Dinas sosial dan Tenaga Kerja dalam mengawasi penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota Padang dengan menggunakan kerangka teori berdasarkan dimensi akuntabilitas menurut Sheila Ellwood (1993). Ellwood menjelaskan terdapat empat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik yang terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap memahami tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap penerapan UMP serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, dokumen, internet dan lain-lain. Hasil penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sudah melaksanakan empat indikator dari akuntabilitas menurut Ellwood. Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Salah satunya yaitu masalah anggaran dan minimnya pegawai pengawas yang turun ke perusahaan sehingga pengawasan menjadi tidak merata pada seluruh perusahaan yang ada di Kota Padang. Hal yang perlu dibenahi yaitu dengan penambahan pegawai pengawas, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan serikat pekerja guna memaksimalkan pengawasan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Kata Kunci :Akuntabilitas, Pengawasan, Upah Minimum Provinsi (UMP)

ABSTRACT

ABDUL AZIM (1310831032) Political Science Department, Faculty of Social and Political Sciences Andalas University, Padang 2018. Title Thesis: Accountability of Social Service and Labor in Supervise Implementation of Province Minimum Wage (UMP) in Padang City.

Advisor I: Drs. Syaiful, M.Si, and Advisor II: DewiAnggraini S.IP, M.Si

The implementation of good governance, clean and authoritative or good governance become the ideals and hopes of every nation. One of the principles of good governance is accountability. The realization of accountability is a major goal of public sector reform. Likewise the Social Service and Labor of Padang City which is a government agency that handles social problems and employment. The most basic problem in employment is the fulfillment of wages which is the right that must be obtained workers or labors in their job. Companies can't pay workers below the minimum wage standards who is set by the government. But in the facts, there are still many companies that still pay their workers under the standard Minimum Wage Province (UMP) including in the city of Padang. The aim of this research is to describe the accountability of the Social Service and Labor in supervise the implementation of Provincial Minimum Wage (UMP) in Padang City using a theoretical framework based on accountability dimensions according to Sheila Ellwood (1993). Ellwood explained there are four indicators of accountability that must be met by public sector organizations consisting of legal accountability and honesty, process accountability, program accountability and policy accountability. This research uses qualitative research method with descriptive type. The process of collecting data is done by interviewing key informants who are considered to understand the supervision made by the agency on the implementation of UMP and equip it with some written references such as books, documents, internet and others. The result of research find that the agency has implemented four indicators of accountability according Ellwood. However, there are find some problems and obstacles faced by the service. One of them is the budget problem and the lack of supervisor staff who supervise to the company so the supervision becomes uneven in all companies in the city of Padang. Things that have to be solved is the addition of supervisor staff, improving the quality of human resources and cooperate and coordinate with the union to maximize supervision by the Social Service and Labor in Padang City.

Keywords: Accountability, Supervision, Province Minimum Wage (UMP)